

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI PASCA KONFLIK SOSIAL 23 SEPTEMBER 2019 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Utricia Simatupang
NPP.29.1840

*Asdaf Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: uuutrcsmpng@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The social conflict on September 23, 2019 is proof that the conflict in Jayawijaya Regency is a prolonged conflict. The impacts include damage to public facilities and casualties. **Purpose:** The purpose of the study was to find out how the performance of the social service in rehabilitation after the social conflict disaster of 23 September 2019, what were the inhibiting factors and what were the efforts made by the social service in overcoming these obstacles. **Method:** With qualitative research methods, triangulation techniques are used in data collection, so regarding the validity of the data, a cross-check method will be carried out with the same source but different methods. **Results:** By measuring organizational performance based on five indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. **Conclusion:** The performance of the Department of Social Affairs has met four indicators that are almost in line with expectations for the work to be achieved; Quality of Service, Responsibility, Responsiveness, and Accountability. However, productivity indicators have not yet reached their target where there are constraints in both human and natural resources, as well as inadequate infrastructure.

Keywords: Social Conflict, Rehabilitation

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Konflik sosial pada 23 september 2019 menjadi bukti bahwa konflik di Kabupaten Jayawijaya merupakan sebuah konflik berkepanjangan. Dampak yang ditimbulkan antara lain rusaknya fasilitas publik dan adanya korban jiwa. **Tujuan:** Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja dinas sosial dalam rehabilitasi pasca bencana konflik sosial 23 September 2019, apa saja faktor penghambat dan apa saja upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Dengan metode penelitian kualitatif, digunakan triangulasi teknik dalam pengumpulan data, maka terkait keabsahan data akan dilakukan cara ricek cross cek dengan sumber yang sama namun metode yang berbeda. **Hasil/Temuan:** Dengan mengukur kinerja organisasi berdasarkan lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. **Kesimpulan:** Kinerja Dinas Sosial telah memenuhi empat indikator yang sudah hampir sesuai harapan akan hasil kerja yang ingin dicapai; Kualitas Layanan, Responsibilitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. Namun, indikator produktivitas belum mencapai targetnya dimana terdapat kendala dalam Sumber Daya baik manusia dan alam, serta sarana prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Rehabilitasi

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Membahas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007, tentang Sistem Penanggulangan Bencana bahwa salah satu tahapan dalam penanggulangan pasca bencana yaitu tahap pemulihan (Rehabilitasi). Tahapan ini muncul setelah tanggap darurat, dimana pada tahapan ini yang menjadi penekanan adalah pada upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan dalam mengembalikan situasi dan kondisi masyarakat beserta lingkungannya. Ditetapkan bahwa dalam rangka mempercepat fase rehabilitasi ini, perlu adanya skala prioritas dalam menjalankan fase rehabilitasi tersebut. Hendaknya dalam menentukan skala prioritas ini didasari hasil analisis mengenai dampak kerugian serta kerusakan yang terjadi sebagai akibat daripada bencana.

Konflik Sosial sendiri menjadi salah satu bencana sosial dengan frekuensi kejadian paling sering terjadi di Papua. Dimana Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu daerah yang paling rawan konflik sosial. Konflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya pada 23 September 2019 yang menggegerkan Indonesia dimana menyentak rasa kemanusiaan publik. Masih menjadi tanda tanya besar, mengapa hoax yang beredar bisa memicu para kelompok protes anti-rasisme dari kalangan para pelajar bisa semeledak yang akhirnya menghancurkan separuh daerah. Berdasarkan isu dimana ada seorang pengajar yang mengeluarkan kata berupa kata-kata rasis, sehingga menurut para pelajar sebagai bentuk solidaritas mereka, akhirnya mereka melakukan aksi demonstrasi berupa unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan yang besar dan hebat. Dampak yang ditimbulkan cukup besar dan sangat merugikan.

Berpedoman pada pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang membahas tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi pemerintah daerah di kota Wamena dimana terdapat ruang lingkup yang melandasi setiap kegiatan rehabilitasi pasca bencana, yaitu: pemulihan sosial dalam segi psikologis dan juga pelayanan kesehatan korban, pemulihan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan serta ketertiban, pemulihan untuk keberfungsian pemerintahan serta fungsi pelayanan publik, perbaikan kembali lingkungan di wilayah terdampak bencana, serta perbaikan kembali sarana dan prasarana umum, adanya bantuan berupa renovasi kembali rumah-rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, rekonsiliasi dan juga resolusi konflik.

Memenuhi terlaksananya tujuan pemerintahan, terdapat pula fungsi pemerintahan yang mana salah satunya yaitu fungsi pelayanan. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani tahapan pemulihan untuk bencana konflik sosial yang menimpa Kabupaten Jayawijaya bertujuan untuk mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat.

Mendorong wilayah terdampak konflik sosial agar pulih dan bisa bangkit kembali maka peran pemerintah sangat diperlukan untuk menyadarkan dan membantu masyarakat. Usaha meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial di kota Wamena, maka Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya melalui tugasnya di kota Wamena perlu melakukan upaya terbaiknya dalam memulihkan wilayah ini dan berupaya mengatasi setiap kendala-kendala yang menghambat proses pemulihan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, karena sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu instansi. Kendala utama yang ada dikarenakan terbatasnya personil dari Dinas Sosial. Permasalahan sumber daya manusia yang lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Ditambah minimnya sarana prasarana yang ada memang perlu di perbarui dan dilengkapi lagi agar setiap pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan karena fasilitas yang memadai. Selain itu, lemahnya perlindungan berupa regulasi khusus hingga tidak ada kemajuan yang lebih baik dan signifikan apabila terjadi bencana konflik sosial kedepannya. Terlepas dari adanya perhatian khusus disertai peran Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan pasti banyak dijumpai hambatan terutama dalam mencapai kualitas pelayanan. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan kewajiban semua pihak, dengan harapan adanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat baik berupa kebutuhan pelayanan maupun kebutuhan akan fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait tahap pemulihan bencana sosial di Kabupaten Jayawijaya belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mencoba mengkaji dari beberapa kumpulan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan judul yang peneliti angkat.

Muhammad Lukmanul Hakim dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018, mengemukakan hasil penelitiannya dimana Peran dinsos sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjadi kaki tangan walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang sosial. Program khusus dalam penanganan Kebakaran dalam bantuan sosial yaitu: permakanan (khusus kebutuhan pangan), Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), untuk korban jiwa dengan bantuan santunan kematian, Pelayanan Dapur Umum, dan juga penyuluhan dalam mitigasi pencegahan resiko bencana. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya anggaran dan sarana prasarana dalam mobilisasi pergerakan.

Arief Ifana Putra dengan judul penelitian Analisis Kinerja Dinas Sosial Kota Padang dalam Penanggulangan Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan), mengemukakan hasil penelitiannya dimana kualitas kerja dinas sosial dikatakan sudah baik, kuantitas kerja dinas sosial kota Padang sudah cepat tanggap dalam penanggulangan bencana walau mengalami keterbatasan pengetahuan di bidang IT, namun pengetahuan pekerjaan pegawai dinas sosial kota Padang terhadap penanggulangan bencana sudah cukup baik. Selain itu, kerjasama dan inisiatif antar pegawai dinas sosial cukup tinggi.

Dea Riska dengan judul penelitian Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat mengemukakan hasil penelitiannya dimana BPBD DKI Jakarta memiliki UPT Pusat Data dan Informasi kebencanaan dimana Ketika bencana terjadi akan langsung terlihat datanya. Peran BPBD disini sebagai koordinator dan bekerja sama dengan Lembaga-lembaga terkait.

M Maryanti, Diane Tanti Poli, Admiral Musa Julius, Andi Ahmad Aminullah, Andi Windra Sandi dengan judul penelitian Studi Lapangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Oleh BPBD Provinsi Lampung Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda Tahun 2020, mengemukakan hasil penelitiannya dimana Pemda, Pemprov, dan pusat melalui kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian

terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan dengan melakukan strategi dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana dan dibedakan menjadi sektor-sektor.

1.4. Pernyataan Kebarnan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya meneliti mengenai peran, analisis, dan studi lapangan dengan variable serta actor yang berbeda dengan yang peneliti lakukan. Pada penelitian ini, peneliti mengaji kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019. Metode yang dipakai yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menguji teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2006) yang terdiri dari lima indikator kinerja: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dinas sosial dan upaya serta faktor hambatan dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya.

II. METODE (5-10%)

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi sedalam-dalamnya dengan pengumpulan data dari berbagai sumber sehingga menunjukkan secara detail data yang diteliti.

Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer yang peneliti gunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung dan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber lain: buku, catatan internal organisasi, laporan, berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari, memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, artikel jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan.

Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (*redundancy*).

Instrumen penelitian yang digunakan ialah turun langsung ke lapangan untuk mengamati sekaligus pengumpul data dan instrumen bantuan seperti alat bantu berupa tape recorder, note/buku catatan, dan juga kamera untuk mengumpulkan data sebagai pendukung.

Teknik pengumpulan data menggunakan yaitu triangulasi yaitu dengan Wawancara (*Interview*), Observasi (Pengamatan), dan Dokumen.

Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan menyeleksi data yang kemudian akan dianalisis data-data atau dengan reduksi data yaitu, pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan-kesimpulan penarikan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

3.1 Kinerja Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Pasca Konflik Sosial 23 September 2019 di Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat kerentanan akan bencana sosial terutama konflik sosial masih tinggi. Meninjau kembali akar penyebab terjadinya konflik di Papua, masalah pelanggaran HAM menjadi isu paling mengemuka terkait segala problema yang terjadi di Papua. Sudah semestinya, masalah konflik sosial yang terjadi mengharuskan semuapihak perlu menyelesaikan lewat jalan dialog. Selain itu, sudah sepatutnya aparat keamanan dapat menghindari cara-cara kekerasan agar menghindari potensi timbulnya pelanggaran HAM lebih lanjut lagi.

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya seolah tak pernah berhenti, selalu muncul masalah-masalah baru dimana sangat sering menimbulkan kerugian berupa korban jiwa, kerusakan, dan lain sebagainya. Skripsi ini membahas tentang konflik sosial yang terjadi baru-baru ini tepatnya pada tanggal 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya. Terjadi di beberapa titik di Kabupaten Jayawijaya dimana berpusat di Kota Wamena. Sebagian besar massa menggunakan seragam SMA melakukan aksi pengrusakan serta pembakaran sejumlah bangunan, dimana konflik ini sampai menimbulkan korban jiwa sebanyak 33 orang.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana terkhususkan untuk rehabilitasi dari Kabupaten Jayawijaya pasca konflik sosial 23 september 2019. Dalam menangani tahapan pemulihan untuk konflik sosial yang menimpa Kabupaten Jayawijaya memiliki tujuan utama untuk mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat Jayawijaya.

Upaya dari Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana terkhususkan untuk rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019. Dalam menangani tahapan pemulihan untuk konflik sosial yang menimpa Kabupaten Jayawijaya ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat Jayawijaya. Dalam hal ini, kinerja menentukan ukuran dari berhasil tidaknya misi sebuah organisasi.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, dalam meninjau lebih jauh terkait kinerja Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019, peneliti menggunakan dimensi kinerja yaitu meliputi: (a) produktivitas, (b) kualitas layanan, (c) responsivitas, (d) responsibilitas dan (e) akuntabilitas.

3.1.1 Produktivitas

Pada dasarnya, produktivitas merupakan hubungan yang terjadi antara masukan (input) dan juga keluaran (output). Hubungan yang dimaksud adalah tentu terdapat perbedaan antara produktivitas dengan efektivitas dan efisiensi. Perbedaan itu terletak pada dimana produktivitas berperan sebagai ukuran dari tingkat efisiensi dan efektivitas akan sumber yang digunakan. Konsep produktivitas sendiri yaitu mengukur tingkat efektivitas pencapaian tujuan pelayanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelayanan publik dari hasil kinerja sebuah organisasi/perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dari Dinas Sosial sendiri sudah memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan rehabilitasi pasca konflik sosial yang terjadi. Walaupun, capaian kinerja Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 belum seluruhnya dapat terlaksana sesuai dengan targetnya. Penyebabnya adalah belum adanya regulasi khusus dari pemerintah daerah maupun pusat.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat membuktikan bahwa Dinas Sosial mulai menjangkau setiap korban terdampak konflik sosial di setiap titik pengungsian yang ada. Pelayanan dimulai dari pemulihan psikologis, pelayanan akan kebutuhan masyarakat, sampai kepada perbaikan sarana prasarana.

A. Efektivitas pencapaian tujuan pelayanan publik

Efektivitas diukur dari kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai sebagai target dimana berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Dalam hal ini, efektivitas dilihat dari kesesuaian kebijakan dengan tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Sosial.

Kebijakan yang diambil seharusnya memang tidak boleh bertentangan dengan tugas pokok dari masing-masing bidang karena tugas dan pekerjaan sudah diatur oleh peraturan yang ada. Hal ini berimplikasi pada keefektifan jalannya pelayanan publik pada saat penanganan rehabilitasi pasca konflik sosial. Akhirnya, Dinas Sosial bersinergi dengan dinas lainnya dalam penanggulangan konflik sosial ini. Hasilnya dijelaskan berikut ini.

a) Dari Kementerian Sosial langsung terdapat bantuan serta pelayanan kepada masyarakat terdampak termasuk dalam pemberian bantuan stimulan bagi unit UMKM.

b) Bersama dengan PUPR, diadakan pendataan kerusakan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) yaitu: 15 unit perkantoran yang rusak berat, 663 unit ruko terbakar, 1 unit SPBU, 18 unit sekolah yang terbakar, 124 unit yang terbakar, 16 unit perkantoran yang terbakar, 1 unit tempat ibadah yang terbakar, 101 unit motor terbakar, dan juga 122 unit mobil yang terbakar.

Kegiatan dengan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak pasca konflik sosial. Selain itu juga melaksanakan program pemulihan bagi masyarakat terdampak konflik sosial. Kegiatan berupa Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Dua pekan pasca kerusuhan, Tim LDP didampingi dan dibantu oleh Petugas Lapangan Dinas Sosial telah menjangkau 10 titik pengungsian, melakukan berbagai kegiatan dan melayani lebih dari 5.000 pengungsi. Sasaran LDP adalah anak-anak dan remaja, serta perempuan dewasa.

B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pelayanan Publik

Efisiensi mengukur perbandingan penggunaan input disertai dengan realisasi penggunaannya, sehingga semakin besar input, dengan penggunaan yang hemat berarti efisiensi semakin meningkat, sehingga

orientasinya bertumpu pada input. Sedangkan input menjadi volume dari semua sumber daya yang dapat digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Konflik sosial 23 september 2019 di kabupaten Jayawijaya menerima banyak sumber daya (input) untuk proses penanganan pasca bencana lewat tahapan rehabilitasi.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelayanan publik, yaitu minimnya sarana prasarana yang ada. Terutama yaitu tidak adanya kendaraan roda 4 yang mampu menunjang kinerja dinas sosial. Kesulitan dalam mobilisasi menyebabkan kinerja Dinas Sosial terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi maupun data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Produktivitas kinerja pelayanan publik dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 belum dapat dikatakan efektif dan efisien. Belum maksimal segala upaya yang dikerahkan Dinas Sosial dalam melayani masyarakat korban konflik sosial, untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.

3.1.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan sangat krusial dalam mempertahankan hasil kerja dalam waktu yang lama. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi masyarakat atas pelayanan yang nyata-nyata diterima dan pelayanan yang diharapkan dari sebuah organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, Dinas Sosial kabupaten Jayawijaya menyusun beberapa program kegiatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019. Langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat untuk melakukan kajian cepat kebutuhan dasar pengungsi berupa sandang, papan, dan layanan psikososial. Langkah kedua, kemudian

memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi pengungsi. Langkah ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan di tahap pertama. Kemudian langkah keempat yang dilakukan yaitu mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jayawijaya dan PKH Lanijaya, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jayawijaya dan TKSK Lanijaya. Langkah kelima, membuka akses penyintas terhadap Program Perlindungan Sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (KUBE) dan Rehabilitasi Sosial Anak.

3.1.3 Responsivitas

Responsivitas dijadikan salah satu ukuran untuk melihat pelayanan publik dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dan tindakan organisasi dalam menanggapi keluhan tersebut. Responsivitas juga dapat digunakan untuk melihat apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Responsivitas berorientasi pada proses sebagai berikut: Organisasi menerima keluhan publik; Organisasi menyikapi keluhan yang diterima; Keluhan itu menjadi bahan referensi perbaikan pelayanan publik organisasi, dan; Adanya tindakan selanjutnya dalam sistem pelayanan baru yang berlaku.

Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengansendirinya menunjukkan kinerja yang jelek dan menunjukkan kegagalan organisasi. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sikap dan produk dari Kinerja Dinas Sosial yang dihasilkan harus dapat merefleksikan dinamika dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Artinya dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, memberi pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Disamping itu, pemahaman terhadap tugas-tugas dan fungsi darimasing-masing seksi juga sangat diperlukan. Suatu organisasi dituntut untuk peka terhadap tugas dan fungsinya baik secara individu maupun secara organisasi dan juga tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sehingga tujuan dari organisasi yang dalam hal ini kantor Dinas Sosial akan tercapai.

3.1.4 Responsibilitas

A. Prosedur Pelayanan Sesuai dengan Prinsip-prinsip Administrasi Dalam rangka rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019

peran dari Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sangat penting, karena Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya memiliki kewenangan dan juga kewajiban dalam mengembalikan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya Dinas Sosial, tentunya tidak mudah, sangat memerlukan sebuah proses yang tepat.

Sistem penanggulangan bencana dimana dalam peraturan kepala BNPB nomor 13 tahun 2008, terdapat proses manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana yang meliputi delapan tahapan.

- 1) Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan
- 2) Pengadaan dan/atau Penerimaan
- 3) Pergudangan dan/atau Penyimpanan
- 4) Pendistribusian
- 5) Pengangkutan
- 6) Penerimaan di tujuan

7) Penghapusan

8) Pertanggungjawaban

Proses penanggulangan pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya, korban terdampak bencana adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Dibentuk tim panitia penanganan konflik sosial dimana Dinas Sosial turut serta dalam kepanitiaan. Terdata sebanyak 36,757 jiwa yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Wamena. Petugas lapangan Dinas Sosial langsung mendata disetiap titik pengungsian dan segera melaporkan kepada ketua panitia. Selain itu, setiap kebutuhan dasar masyarakat pengungsi dirincikan mulai dari sandang, pangan, dan papan. Kegiatan penanganan penyintas pasca konflik sosial 23 september 2019 mendapat bantuan langsung dari pusat yaitu kementerian sosial dalam mengenali kebutuhan para pengungsi berupa kebutuhan dasar tertera pada tabel di atas. Untuk santunan kepada ahli waris korban meninggal, santunan adalah sebesar Rp15.000.000 per jiwa.

Berpedoman pada proses manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana, dan juga berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi maupun hasil dokumentasi yang telah peneliti lakukan, Responsibilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sudah cukup baik, Pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat karena dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Sosial selalu berorientasikan pada proses yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan manajemen logistik dan peralatan. Dinas Sosial mampu patuh terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku selama melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

3.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan petunjuk pelaksana yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat dikatakan juga sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode.

A. Kepentingan Masyarakat

Kepentingan masyarakat merupakan satu aspek yang perlu di perhatikan dalam proses pemulihan daerah pasca konflik sosial. Kepentingan masyarakat merupakan kepentingan umum yang mewujudkan kesejahteraan bersama. Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya adalah perwakilan pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pemulihan dan pengembalian kesejahteraan masyarakat Jayawijaya sehingga harus adanya transparansi atas semua jenis kegiatan, program dan anggaran dalam pemulihan daerah Jayawijaya pasca konflik sosial.

B. Pencapaian Target

Pencapaian target merupakan suatu hal yang diharapkan dalam melakukan suatu program yang telah di rencanakan. Sama halnya dengan pemulihan daerah pasca konflik sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Sosial yang mana dilakukan program-program dengan tujuan menciptakan Kembali kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan Dinas Sosial. Dimana terdapat upaya yang dilakukan berupa: koordinasi dan kaji cepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi, Layanan Dukungan

Psikososial (LDP) bagi korban terdampak konflik sosial, dan juga pengerahan tenaga relawan penanganan bencana.

3. 2 Hambatan yang dihadapi Oleh Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Pasca Konflik Sosial 23 September 2019 di Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya, faktor- faktor penghambat yang dijumpai yaitu:

1. Sarana dan Prasarana belum memadai

Pasca terbakarnya kantor Bupati Jayawijaya akibat konflik sosial 23 September 2019, seluruh pelayanan OPD non teknis langsung dipusatkan di Gedung Otonom Wenehule Hubi. Selama ini gedung tersebut hanya ditempati beberapa OPD dan kini pemanfaatannya dioptimalkan dengan menjadikannya pusat pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Hal ini menyebabkan kantor Dinas Sosial tidak memiliki Gedung sendiri, dan berlokasi di lantai 6 gedung Otonom Wenehule Hubi. Pada saat kunjungan ke kantor Dinas Sosial, tidak banyak komputer yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan sama sekali. Banyak meja yang kosong begitu saja. Selain itu, yang paling penting untuk menunjang kinerja Dinas Sosial terutama pada saat turun ke lapangan yaitu kendaraan roda 2 dan roda 4 masih sangat kurang. Kendaraan roda 2 hanya terdapat dua buah di kantor Dinas Sosial. Bahkan, tidak terdapat kendaraan roda 4. Hal ini menyebabkan pada saat turun ke lapangan, pegawai Dinas Sosial harus menggunakan kendaraan pribadi mereka masing-masing.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, karena sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu instansi. Sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019.

3. Belum Adanya Regulasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya belum membuat regulasi untuk mengatur system penanggulangan bencana pasca konflik sosial dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca konflik sosial

23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya belum membuat regulasi khusus untuk mengatur sistem penanggulangan pasca konflik sosial dimana hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan dan juga tidak ada kemajuan yang lebih baik dan signifikan apabila terjadi konflik sosial kedepannya.

3.3 Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial dalam Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Rehabilitasi Pasca Konflik Sosial 23 September 2019 di Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti saat turun langsung ke lapangan, maka peneliti dapat melihat ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya untuk mengatasi hambatan ataupun permasalahan-permasalahan dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya, antara lain:

1. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Melengkapi fasilitas perkantoran Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, seperti penambahan komputer, dan juga perbaikan saklar karena banyak yang tidak berfungsi. Selain itu pengadaan akan

kendaraanroda 2 dan roda 4, karena mengingat kesulitan dalam mobilisasi ketika parapetugas lapangan dinas sosial turun ke lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan.

2. Peningkatan SDM

Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat daerah kabupaten Jayawijaya terkait pentingnya saling menjaga hubungan antar-sesama dan juga pentingnya pengetahuan akan Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur:

(a) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan agar supaya aparatur pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya memiliki pengetahuan lebih dalam dan pentingnya mengemban tugas dengan baik di bidangnya masing-masing terutama dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial. Sehingga dalam melaksanakan program-program Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya dalam penanggulangan pasca konflik sosial sesuai dengan yang diharapkan.

(b) Dengan memperhatikan masalah kedisiplinan aparat Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya melalui finger print dan dibutuhkan sikap tegas dalam menangani masalah kedisiplinan dari atasan langsung.

3. Pembuatan Regulasi

Pembuatan regulasi/peraturan sangatlah penting untuk mengontrol jalannya kegiatan rehabilitasi pasca konflik sosial yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dengan dibuatnya regulasi maka suatu kegiatan penanggulangan pasca konflik sosial bisa mendatangkan hasil positif bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Dalam hal ini pemerintah papua baru memiliki Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Papua.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada 28 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Kota Wamena untuk melihat situasi kondisi terkini dari kota Wamena pasca konflik sosial yang terjadi. Presiden meminta proses rekonstruksi dan rehabilitasi agar segera dilakukan dan memerintahkan secara khusus juga untuk pemulihan situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya. Memenuhi terlaksananya fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, pemerintah kabupaten Jayawijaya mengerahkan Dinas Sosial untuk menangani tahap pemulihan kota Wamena pasca konflik sosial dalam fase rehabilitasi.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana terkhususkan untuk rehabilitasi dari Kabupaten Jayawijaya pasca konflik sosial 23 september 2019. Dalam menangani tahapan pemulihan untuk konflik sosial yang menimpa Kabupaten Jayawijaya memiliki tujuan utama untuk mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat Jayawijaya.

Upaya dari Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana terkhususkan untuk rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019. Dalam menangani tahapan pemulihan untuk konflik sosial yang menimpa Kabupaten Jayawijaya ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat Jayawijaya. Dalam hal ini, kinerja menentukan ukuran dari berhasil tidaknya misi sebuah organisasi.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan factor yang menghambat keterbatasan dimana minimnya sarana dan prasarana yang ada, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan juga belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait penanganan konflik sosial.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Berdasarkan hasil penelitian analisis dari indikator yang dibahas dalam pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Kinerja Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya yaitu: 1) Kinerja Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya sudah dapat dikatakan cukup baik. Peneliti mengukur kinerja organisasi dengan lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator sudah cukup baik karena sudah sesuai harapan akan hasil kerja yang ingin dicapai; Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Tetapi, indikator Produktivitas bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas. 2) Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam rehabilitasi pascakonflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya adalah keterbatasan dimana minimnya sarana dan prasarana yang ada, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan juga belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait penanganan konflik sosial yang ada di Kabupaten Jayawijaya. 3) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya untuk menghadapi hambatan dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 adalah dengan meningkatkan segala sarana dan prasarana kantor yang ada dengan melakukan peninjauan atau survei lapangan, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai sarana dan prasarana apa saja yang rusak dan perlu perbaikan ataupun perlu diadakan. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat daerah kabupaten Jayawijaya terkait pentingnya saling menjaga hubungan antar-sesama dan juga pentingnya pengetahuan akan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, Pembuatan regulasi/peraturan sangatlah penting untuk mengontrol jalannya kegiatan rehabilitasi pasca konflik sosial yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan sedikit saran dengan maksud dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya. 1) Meningkatkan kualitas dari sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya dan setiap pihak yang terkait dalam hal kesejahteraan masyarakat. Dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan agar supaya lebih memahami dan menguasai bidang dan tupoksi masing-masing. 2) Kepada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya untuk dapat melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk dapat menunjang kegiatan seperti mobilisasi yaitu dengan pengadaan kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan juga pembenahan sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor berupa komputer, printer dan lain sebagainya yang mana itu merupakan wujud pelayanan bagi masyarakat. Selain itu harus dilakukan perawatan secara rutin terhadap sarana dan prasarana yang telah ada. 3) Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Jayawijaya segera merancang dan mengeluarkan regulasi khusus terkait penanggulangan pasca konflik sosial. Dalam pelaksanaan program pemulihan pasca konflik sosial sebaiknya Dinas Sosial dapat melibatkan masyarakat untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Peristiwa konflik sosial 23 september 2019 yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya kiranya memberikan pelajaran dan memberi kesadaran bagi semua pihak. Keberagaman seharusnya malah menjadi kekuatan dalam membangun daerah Kabupaten Jayawijaya. Perbedaan adalah fitrah, kini saatnya masyarakat

daerah Jayawijaya bergandengan tangan, dan hidup Bersama-sama dalam menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang tersedia dan biaya yang digunakan untuk penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait penelitian ini dilokasi berbeda namun membahas mengenai rehabilitas pada saat pasca konflik bencana sosial.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada orang tua penulis, para dosen pembimbing dan dosen penguji dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A., 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamdi, M. dan Ismaryati, S. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas terbuka.
- Hasibuan, M., 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT BumiPerkasa.
- Hasibuan, M., 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- , 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Alhadi, Z., 2019. “Analisis Kinerja Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)”, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik Vol.2 No.1*, Padang: JMIAIP
- Hakim, Muhammad Lukmanul., 2018. “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran Di Kota Samarinda Tahun 2018”, *Jurnal Administrasi Publik Vol.1 No.1*, Samarinda: UNTAG
- Maryanti, M., dkk. 2020. “Studi Lapangan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Oleh BPBD Provinsi Lampung Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda Tahun 2018”, *Jurnal Manajemen Bencana Vol. 6, No. 2*, Bogor: JMB
- <http://repository.ut.ac.id/3839/1/EKMA5320-M1.pdf>. Modul 1 Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja. Selasa, 7 September 2021

<https://acleddata.com/#/dashboard>. ACLED. Selasa, 31 Agustus 2021

<https://en.wikipedia.org/wiki/Wamena>. Wamena. Jumat, 27 Agustus 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua. Konflik Papua. Kamis, 2 September 2021

<https://kemensos.go.id/penanganan-kerusuhan-sosial-wamena-kabupaten-jayawijaya-provinsi-papua>. Penanganan Kerusuhan Sosial Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Jumat, 27 Agustus 2021

<https://tirto.id/apa-saja-faktor-penyebab-konflik-sosial-dalam-masyarakat-gacU>. Apa Saja Faktor Penyebab Konflik Sosial dalam Masyarakat?. Sabtu, 4 September 2021

<https://tirto.id/teori-konflik-sosial-menurut-max-weber-dan-pengertiannya-gijR>. Teori Konflik Sosial Menurut Max Weber dan Pengertiannya. Sabtu, 4 September 2021

